

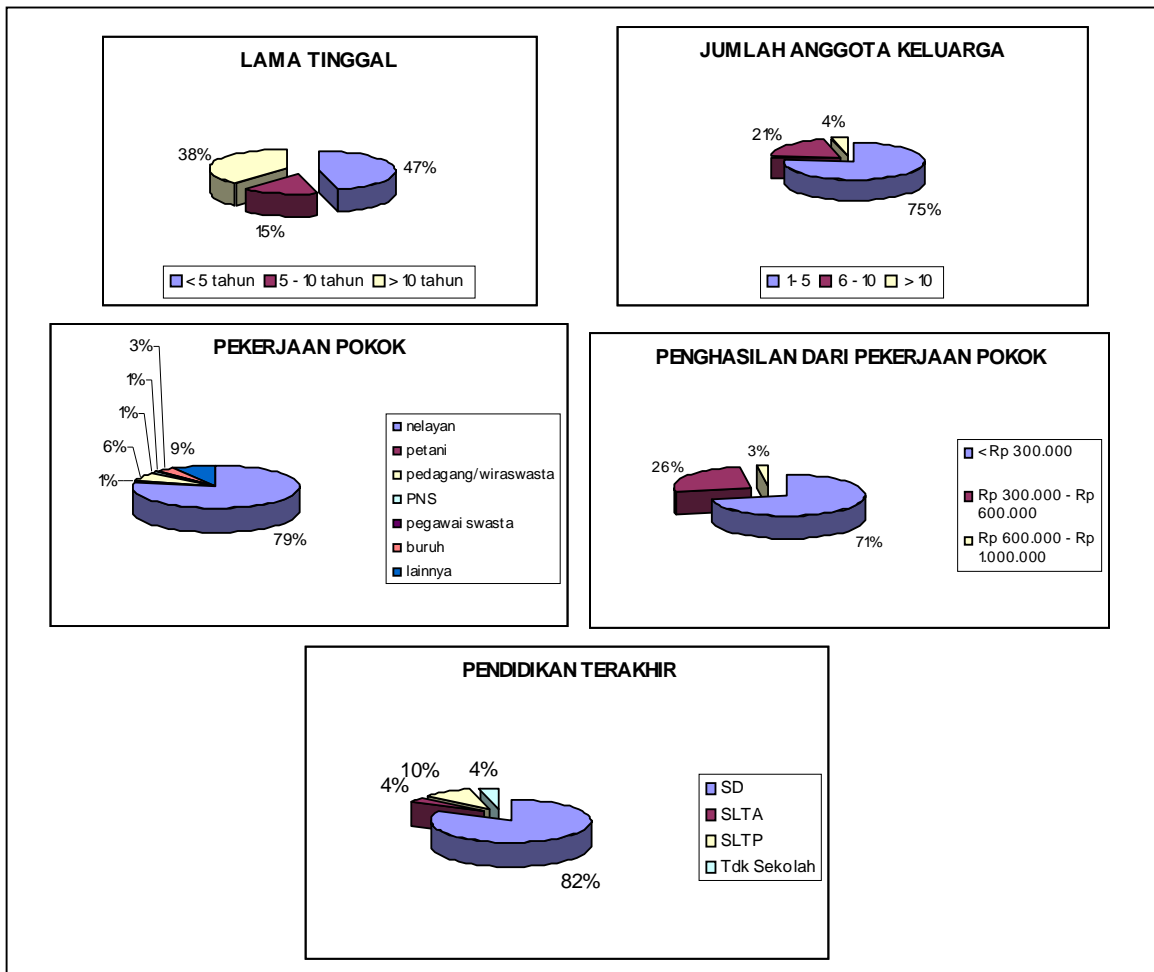
## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara struktural, dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan yaitu: pertama, mendapatkan kondisi sosio ekonomi masyarakat nelayan Bandengan dan kondisi sanitasi lingkungan di permukiman nelayan Bandengan; kedua, menyusun karakteristik, potensi dan masalah dari kelompok komunitas tersebut dan ketiga, menyusun model pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada penelitian tahun I dan tahun II ini melaksanakan tahap yang ketiga. Sebagai gambaran hasil penelitian di tahun I, berikut akan diuraikan secara ringkas mengenai karakteristik masyarakat (kondisi sosio ekonomi) dan kondisi sanitasi lingkungan serta potensi kelompok masyarakat (komunitas). Uraian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai kajian dalam penentuan model pemberdayaan.

#### **5.1. Karakteristik Masyarakat**

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang disebarkan pada 78 responden (masyarakat) di lingkungan RW IV pada tahap penelitian di tahun I, diperoleh gambaran karakteristik masyarakat yang antara lain tercermin dari lama tinggal, jumlah anggota keluarga, pekerjaan pokok, pendapatan dan pendidikan. Lama tinggal di RW IV Kelurahan Bandengan yang menunjukkan bahwa 46% penghuni menempati permukiman nelayan Bandengan < 5 tahun. Masyarakat RW IV Kelurahan Bandengan sebelumnya menempati bantaran sungai Kendal dan oleh pemerintah Kabupaten Kendal mereka direlokasi pada tahun 2003 dan tempat relokasi penduduk terletak disebelah utara Kelurahan Bandengan. Rata-rata masyarakat di RW IV Kelurahan Bandengan tiap keluarga memiliki 1-5 jiwa dan mayoritas masyarakat mempunyai pekerjaan pokok sebagai nelayan (78%) dengan pendapatan kurang dari Rp. 300.000 per bulan. Sementara pendidikan responden tergolong rendah, karena sebagian besar (82%) masyarakat mempunyai tingkat pendidikan terakhirnya lulus SD atau sederajat. Gambar 5.1. berikut adalah gambaran mengenai karakteristik responden.



Gambar 5.1. Karakteristik Responden

## 5.2. Karakteristik Kondisi Sanitasi Lingkungan

Karakteristik kondisi sanitasi lingkungan tercermin dari kondisi rumah (tempat tinggal), air bersih yang digunakan oleh masyarakat RW IV Bandengan, jamban/MCK, pengelolaan sampah dan saluran air limbah atau drainase. Visualisasi kondisi eksisting karakteristik kondisi sanitasi lingkungan permukiman nelayan Bandengan antara lain dapat dilihat pada Gambar 5.2., 5.3., 5.4. dan 5.5.

### 5.2.1. Rumah (tempat tinggal)

Umumnya rumah masyarakat RW IV Kelurahan Bandengan sudah berbentuk semi permanen tetapi kondisi rumah yang belum di *spesi*. Selain rumah semi permanen ada juga rumah yang non permanen yang terbuat dari papan, rumah non permanen ini

kondisinya kurang baik. Rumah yang rata-rata dibangun pada tahun 2004 dan 2005, ini umumnya semi permanen dengan dinding tembok yang belum dispesi, lantainya terbuat dari plesteran dan ada yang menggunakan tanah.

Di setiap rumah yang sudah permanen biasanya sudah terdapat jendela atau ventilasi, namun terdapat pula rumah yang telah memiliki kusen jendela, tetapi ditutup dengan kayu atau tripleks, sehingga pada siang hari sinar matahari tidak dapat menerangi rumah tersebut.

Asal usul kapling rumah atau rumah masyarakat dibedakan menjadi tiga yaitu masyarakat yang dapat tanah saja dan membangun sendiri, kredit dan ada masyarakat yang dapat hibah dari pemerintah Kuwait, tetapi sebagian besar diperoleh melalui kredit kepada pemerintah Kabupaten Kendal setiap bulannya Rp. 30.000- Rp. 50.000.



Gambar 5.2. Visualisasi Beberapa Rumah Permanen dan Semi Permanen dengan Dinding terbuat dari Tembok/Papan dan lantai Plesteran/Tanah

### 5.2.2. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia agar dapat melangsungkan kehidupannya. maka penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu mutlak diperlukan. Kondisi pelayanan air bersih di RW IV Kelurahan Bandengan, dapat dikatakan sudah baik dari sisi jangkauan pelayanannya. Air bersih di RW IV Kelurahan Bandengan sudah disediakan oleh PDAM, hampir 92 % masyarakat RW IV sudah terlayani oleh

PDAM dan sisanya menggunakan air sumur untuk memenuhi air bersih. Untuk kualitas air yang digunakan oleh masyarakat RW IV, secara visual airnya jernih, tidak berwarna dan tidak berbau serta dilihat dari kontinuitasnya selalu tersedia baik pada musim kemarau maupun musim hujan.



Gambar 5.3. Sumber air dari PDAM dan Sumur gali

### 5.2.3. Jamban

Masyarakat RW IV Kelurahan Bandengan umumnya membuang hajat besar disungai. Selain itu warga tidak terbiasa memakai jamban yang ada di dalam rumah dan warga menganggap itu tidak menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi karena masih ada kebutuhan pokok yang harus di penuhi setiap harinya. Selain di sungai ada beberapa rumah yang sudah menggunakan jamban keluarga, jamban keluarga tersebut secara fisik kondisinya kurang terawat. Sedangkan untuk MCK Umum di RW IV Kelurahan Bandengan tidak ada karena mereka belum mampu untuk membuat MCK di RW IV Kelurahan Bandengan. Pada tahun 2005 pernah terdapat jamban umum namun jamban tersebut mengalami pengusuran pada saat jalan inspeksi yang berada di tepi sungai Kendal akan dilebarkan (disampaikan oleh Ketua RT 2), sehingga sampai saat ini belum ada usaha kembali untuk membuat jamban umum.



Gambar 5.4. Visualisasi Tempat Buang Hajat di RW IV (WC dan Sungai)

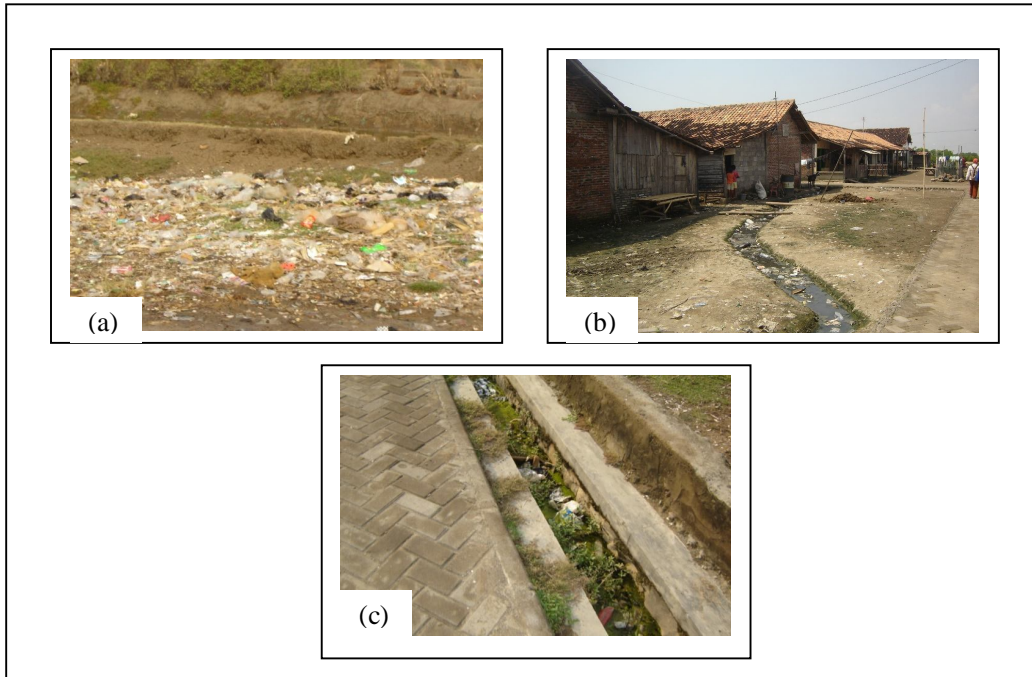
#### 5.2.4. Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat di RW IV Kelurahan Bandengan saat ini masih menggunakan sistem bakar dan dibuang ke sungai. Untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh penduduk, diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung diantaranya: bak sampah di tiap perumahan dan TPS untuk lingkungan, dan sarana pengangkutan dari bak sampah ke TPS hingga ke TPA serta petugas sampah. Fasilitas – fasilitas itu tidak terpenuhi di RW IV Kelurahan Bandengan, sehingga masyarakat membuang sampah di keranjang, ember atau plastik kemudian mereka memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan dan sungai sebagai tempat penampungan sampah atau pembuangan sampah akhir. Sampah yang berada di lahan kosong oleh masyarakat dibakar dan ada juga yang dibiarkan oleh warga setempat.

#### 5.2.5. Pengelolaan Limbah Cair

Saluran pembuangan air yang terdapat di permukiman RW IV Kelurahan Bandengan difungsikan sebagai penyalur air limbah dan air hujan. Saluran drainase yang sudah ada umumnya bersifat permanen dan mengikuti jaringan jalan yang sudah di paving. Selain itu ada jaringan drainase yang sudah permanen, namun kondisinya tertutup dengan tanah sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk merawat drainase. Drainase yang tertutup ini yang menyebabkan terjadinya banjir di RW IV Kelurahan Bandengan. Selain itu terdapat jaringan drainase (saluran pembuangan limbah cair) hanya berupa galian tanah saja. Kondisi yang ada, selain saluran tersebut lebih mirip tempat tampungan genangan limbah cair yang berwarna hitam dan terdapat sampah, sempitnya galian menyebabkan saluran tersebut tidak mampu

menampung air saat musim penghujan. Masyarakat membuat galian tersebut hanya sementara mengingat kondisi jalan yang belum baik yaitu masih terbuat dari tanah.



Gambar 5.5. Visualisasi Pembuangan Sampah di Pekarangan Rumah (a), Pembuangan Limbah Cair di Saluran Tanah (b) dan Saluran Permanen yang tertutup Sampah dan Rumput

### 5.3. Persepsi Masyarakat

Berdasarkan pengolahan hasil dari kuesioner, wawancara dan FGD yang telah dilakukan di Tahun I serta berdasarkan kondisi eksisting, tampak bahwa pemahaman masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih sangat dangkal. Kondisi ini dilatar belakangi masalah kehidupan nelayan terutama perekonomian yang serba sulit. Bagi masyarakat nelayan bisa bertahan hidup saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Masalah lingkungan dan sanitasi masih menjadi permasalahan yang bukan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

Kesulitan hidup juga menumbuhkan sikap tidak mau repot dalam mencukupi kebutuhan sanitasi. Misalkan masalah rumah, bagi mereka bisa berteduh dari panas matahari dan dinginnya hujan sudah cukup. Masalah kondisi bahan bangunan yang tidak layak, lantai yang lembab, tidak ada jendela atau fasilitas dasar rumah yang lain bukan merupakan masalah pokok.

Pemenuhan masyarakat akan air bersih sudah cukup baik. Suplai air dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, memasak dan lain-lain telah terpenuhi. Sedang sebagian kecil masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas PDAM langsung di rumah, mengambil air dari sumur bersama yang sumber airnya berasal dari sumur dalam.

Pemahaman masyarakat terhadap masalah sampah dan pembuangan air limbah juga masih sangat rendah. Sampah di sekitar rumah juga merupakan hal biasa. Mereka menganggap membersihkan sampah merupakan hal yang tidak ada gunanya. Dominasi sampah adalah jenis plastik dan kertas bekas pembungkus bahan makanan yang dibuang begitu saja. Selebihnya adalah sampah organik dari aktivitas rumah tangga (misal sampah dari aktivitas dapur seperti sisa sayur, kulit buah, daun, dll). Tempat pembuangan sampah khusus di tiap-tiap rumah tidak tersedia, sehingga pembuangan hanya dilakukan berserakan di sekitar halaman rumah yang berpotensi masuk ke saluran air atau terbawa angin. Hal ini yang menyebabkan banyak dijumpai sampah yang berserakan di mana-mana. Bagi masyarakat nelayan membakar sampah kering (mengelola sampah secara *on-site*) merupakan hal yang tidak lumrah dan lebih praktis dibuang ke sungai.

Kondisi pembuangan air limbah tidak jauh berbeda buruknya dengan kondisi pengelolaan sampah. Air buangan dari aktivitas rumah tangga hanya dialirkan di sekitar halaman rumah. Mereka tidak mau kesulitan untuk menggali saluran air limbah. Sementara di beberapa bagian permukiman yang sudah terdapat fasilitas drainase baik yang permanen ataupun yang non permanen (galian tanah) juga tidak dimanfaatkan. Proses sedimentasi oleh tanah dan sampah tidak pernah di perhatikan, sehingga saluran tidak berfungsi sama sekali.

Pemahaman masyarakat terhadap sanitasi jamban keluarga tidak berbeda jauh dengan masalah sampah. Keberadaan jamban di dalam rumah, oleh masyarakat Bandengan merupakan hal yang tidak lumrah (hal tabu yang berlaku di masyarakat Bandengan). Menurut istilah masyarakat : "*mosok mangan ning ngisore ana kuning-kuning kae*" (*masak makan kok di bawahnya ada "kuning-kuning" / tinja*). Oleh karenanya jamban dalam rumah dan septic tank di sekitar rumah merupakan hal yang menjijikkan, sehingga buang hajat di sungai atau di empang yang jauh dari rumah merupakan pilihan terbaik dalam budaya masyarakat di Bandengan.

Menurut salah seorang Ketua RT di wilayah RW IV Bandengan (Bp. Hasan), menyebutkan bahwa sebetulnya rumah yang sudah jadi di dalamnya sudah dibuatkan WC,

namun banyak yang tidak dipakai, karena tidak ”*kulina*” (terbiasa), dan tidak mengetahui cara menguras kalau sudah penuh.

#### **5.4. Preferensi Masyarakat**

Berdasarkan pengolahan hasil dari kuesioner dan wawancara serta FGD yang telah dilakukan, diperoleh beberapa preferensi masyarakat mengenai sanitasi lingkungan sebagai berikut:

##### **1. *Pertimbangan masyarakat untuk buang hajat di sungai daripada di rumah***

Dengan alasan tidak terbiasa buang hajat di WC dan tidak mengerti cara menguras WC yang penuh serta adanya “tabu-tabu yang hidup di tengah masyarakat”, maka masyarakat lebih memilih buang hajat di sungai daripada di dalam rumah.

##### **2. *Membuang sampah di sembarang tempat dan sungai***

Pengetahuan masyarakat tentang rumah/lingkungan yang sehat adalah rumah/lingkungan yang bersih tidak ada sampah. Pembuangan sampah dilakukan dengan cara dibakar atau dibuang ke sungai. Namun karena alasan kepraktisan dan tidak cukupnya lahan, masyarakat lebih memilih membuang sampah di sembarang tempat di sekitar rumah dan ke sungai.

##### **3. *Ketidakpedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar***

Meskipun kondisi lingkungan di permukiman nelayan (terutama perumahan Kuwait) masih kelihatan kotor dan kumuh, namun mereka ”*nrimo*” dengan keadaan yang demikian (kurang layak sebagai permukiman yang sehat).

Kendala yang dihadapi saat ini dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah masalah pendanaan, karena jika berbicara masalah iuran (sukarela, atau yang sifatnya rutin bulanan, harian) baik yang sifatnya untuk kegiatan fisik ataupun untuk kegiatan keagamaan, mungkin dari 10 orang yang diminta iuran hanya 3 atau 4 orang saja yang bersedia untuk iuran. Dari pihak RW juga belum ada pemikiran kearah mewajibkan warganya untuk iuran rutin. Solusi yang diambil, sementara ini jika ada kegiatan, pendanaan dihitung untuk kemudian dibagi tiap KK supaya menyumbang sesuai target pendanaannya.

##### **4. *Keinginan masyarakat terhadap kondisi sanitasi lingkungan***

Dalam kaitannya dengan aktivitas buang hajat, maka masyarakat lebih berkeinginan membuat WC umum dibandingkan WC di dalam rumah, karena keterbatasan lahan di lokasi perumahan dan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain



berdekatan, sehingga masyarakat berkeinginan membuat WC umum dengan alternatif lokasi di tepi sungai dan di dekat “*cakruk*” (pos ronda).

Dengan melihat persepsi masyarakat secara umum, terlihat yaitu kurang tertanamnya sifat kebersamaan, maka adanya keinginan adalah *nguri-nguri* (masih mempertahankan) gotong royong / melestarikan budaya gotong royong (seperti apa yang disampaikan oleh Ketua RT 5).

### **5.5. Modal Sosial yang ada di Lingkup Masyarakat Nelayan Bandengan**

Modal sosial dapat diartikan sebagai kerja sama antar warga untuk menghasilkan tindakan kolektif. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (*trust*), eksistensi jaringan (*network*), dan kemudahan bekerja sama (*easy of cooperation*). Modal sosial dapat memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pembangunan masyarakat.

Pernyataan Kostov dan Lingrad (2001) menyebutkan bahwa pembangunan perkampungan/perdesaan di masa datang memerlukan pendekatan baru. Berdasarkan pernyataan ini maka penguatan modal sosial dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di pemukiman nelayan Bandengan dapat dilihat sebagai pembaharuan pendekatan yang sangat penting. Jika pembangunan kawasan perkampungan nelayan ini tidak disertai dengan penguatan modal sosial yang ada (lembaga dan organisasi masyarakat yang sudah eksis) maka upaya partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Upaya pengelolaan sanitasi lingkungan di perkampungan nelayan yang padat penduduknya, dengan memasukkan modal sosial sebagai faktor kunci pemberdayaan masyarakat nelayan, dirasakan sudah sangat dibutuhkan saat ini. Kekurang berhasil pemerintah dalam pengelolaan lingkungan seperti beberapa program P2KT, SANIMAS dapat dijadikan masukan.

Pada tahun kedua ini, berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat terkait dengan sanitasi lingkungan, akan dicoba dipetakan permasalahan yang terkait dengan ketiga hal tersebut di atas. Berdasarkan wawancara ataupun FGD diketahui bahwa harapan masyarakat terhadap pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah sangat tinggi, mengingat di permukiman nelayan Bandengan masalah pengelolaan sampah belum tertangani dengan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Saluran air harapannya dapat mengalirkan air limbah secara lancar, sehingga lingkungan menjadi bersih dan

nyaman. Di samping itu keberadaan WC umum akan sangat membantu masyarakat dalam mengurangi kebiasaan buang air besar (BAB) di tempat terbuka (sungai), oleh karena keterbatasan lahan untuk membuat WC di dalam rumah.

Disamping permasalahan yang ada, terdapat potensi sebagai modal sosial yang bisa dikembangkan terkait dengan pengelolaan sanitasi lingkungan di Kawasan Bandana. Dalam kehidupan masyarakat nelayan Bandengan pengertian kepercayaan dilihat tidak hanya dalam aspek personal, tetapi juga ekstrapersonal. Masyarakat disini awalnya sedikit sulit untuk mengembangkan jejaring kepercayaan. Mereka sudah terlalu apatis dengan kondisi mereka sendiri. Dari sini dapat kita pahami jika kondisi modal sosial pada masyarakat nelayan Bandengan memang tidak begitu baik, tetapi tidak berarti tidak ada sama sekali. Paguyuban rukun warga, pengajian dan arisan masih ada, walaupun eksistensinya sangat kuruang. Ini merupakan salah satu potensi yang bisa dikembangkan dalam mengelola sanitasi lingkungan di permukiman ini.

Pertemuan kelompok masyarakat Bandengan ini biasanya diadakan pada hari jum'at pagi-sebelum shalat Jum'at, begitu juga dengan aktivitas bersama resik-resik kampung. Walaupun tidak secara rutin dan bahkan saat ini dapat dikatakan sangat jarang bertemu, kelompok ini masih dapat diberdayakan dengan cara penguatan modal sosial (kelompok/paguyuban) ini. Di samping itu, tingkat homogenitas masyarakat nelayan akan memudahkan dalam pengaturan peranan anggota masyarakat dalam sistem sosial komunitas penghuni di RW IV, sehingga pengelolaan lingkungan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Melalui pengaturan yang jelas, masing-masing anggota masyarakat dapat berfungsi dan berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

### **5.6. Penguatan Modal Sosial**

Pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun komunitas, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan untuk melakukan transformasi sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup. Kehidupan bermasyarakat perlu dikondisikan sebagai sebuah wadah di mana setiap anggotanya melalui aktivitas sehari-hari saling belajar dan mengajar. Proses interaksi sosial ini akan membuat pertukaran informasi dan pengetahuan terjadi, dan mendorong setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan kegiatan FGD yang dilakukan sebanyak tiga kali (hasil penelitian tahun I), serta kondisi yang ada, maka langkah pertama dalam penguatan modal sosial di kawasan ini adalah melakukan pendampingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang permasalahan sanitasi lingkungan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan melalui pelatihan ini yaitu:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat nelayan terhadap kesehatan keluarga dan sanitasi lingkungan.
- 2) Meningkatkan peranan wanita nelayan sebagai salah satu pengambil keputusan dalam usaha peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.
- 3) Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian kelembagaan masyarakat nelayan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam di kawasan pesisir.
- 4) Meningkatkan kesehatan dan kenyamanan keluarga nelayan

Pada kegiatan pelatihan pertama yang dilakukana pada bulan Juni 2009, yaitu upaya penyadaran bagi masyarakat dengan memberikan materi pelatihan terkait sanitasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Lurah Bandengan dan wakil dari instansi, dalam hal ini adalah perwakilan dari Bappeda Kabupaten Kendal, sedangkan perwakilan dari Dinas Kimturu Provinsi Jawa Tengah tidak dapat hadir. Diharapkan dengan hadirnya *stakeholder* dari pemerintahan akan memberikan pemahaman bagi *stakeholder* bahwa masalah sanitasi yang terjadi di Bandengan perlu mendapatkan perhatian, disamping itu juga dapat dilakukan sosialisasi beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sanitasi.

Selain diberikan materi sanitasi maka pada sesi keduanya diadakan pengantar pelatihan terkait masalah sanitasi (pengelolaan sampah dan penyadaran bagi perilaku masyarakat dalam buang air besar yang masih menggunakan Kali Kendal). Materi pemberdayaan masyarakat yang berbasis gender disampaikan pula, karena permasalahan sanitasi juga terkait dengan pemenuhan hak perempuan dan laki-laki dalam sanitasi, dimana seperti diketahui bahwa pengelolaan sanitasi khususnya air bersih maka terdapat bias gender di dalamnya, sehingga diperlukan pemahaman yang benar mengenai fungsi dan peran perempuan dalam pengelolaan sanitasi. Disamping itu dengan memberikan pemahaman yang benar terkait isu-isu gender dalam pengelolaan sanitasi akan meringankan beban dan tanggung jawab perempuan dalam hal tersebut.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh 33 peserta yang tercakup dalam 6 RT di wilayah RW IV tersebut jumlah peserta antara laki-laki dan perempuan hampir sebanding sehingga permasalahan yang digali akan semakin kompleks, namun walaupun dari segi jumlah yang hampir sebanding tidak serta merta keberadaan perempuan tersebut diakui, sebagian besar perempuan lebih memilih untuk diam dan menyerahkan permasalahan tersebut pada laki-laki.

Seperti yang telah disampaikan di dalam tujuan diadakannya pelatihan ini adalah menumbuhkan kesadaran kritis melalui pelatihan sehingga setelah terbentuknya kesadaran kritis maka akan sangat membantu didalam proses penyadaran tersebut. Berdasarkan hasil diskusi terlihat bahwa masyarakat menyadari terhadap kondisi lingkungan mereka yang kumuh, namun dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan baik dari pemerintah setempat maupun dari pihak-pihak terkait mengakibatkan masyarakat cenderung apatis terhadap kondisi sanitasi mereka. Suasana pelatihan dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.



Gambar 5.6. Suasana Pelatihan Peningkatan Sanitasi Lingkungan Tahap I

Kegiatan pelatihan kedua di lakukan satu bulan kemudian sebagai lanjutan dari kegiatan pelatihan tahap pertama. Materi disampaikan langsung oleh fasilitator dan diprioritaskan pada pelatihan secara lebih terinci mengenai pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah tinja. Pengelolaan sampah pada pelatihan kali ini adalah cara pengolahan sampah dengan pembuatan kompos skala rumah tangga menggunakan metode keranjang Takakura. Pemilihan cara ini didasarkan pada kepraktisan dan peningkatan pemahaman kembali, karena pelatihan pembuatan kompos dengan metode keranjang Takakura sudah pernah diperkenalkan oleh LSM Bintari di RT 3, sehingga masyarakat sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan tersebut dan mempraktekannya.

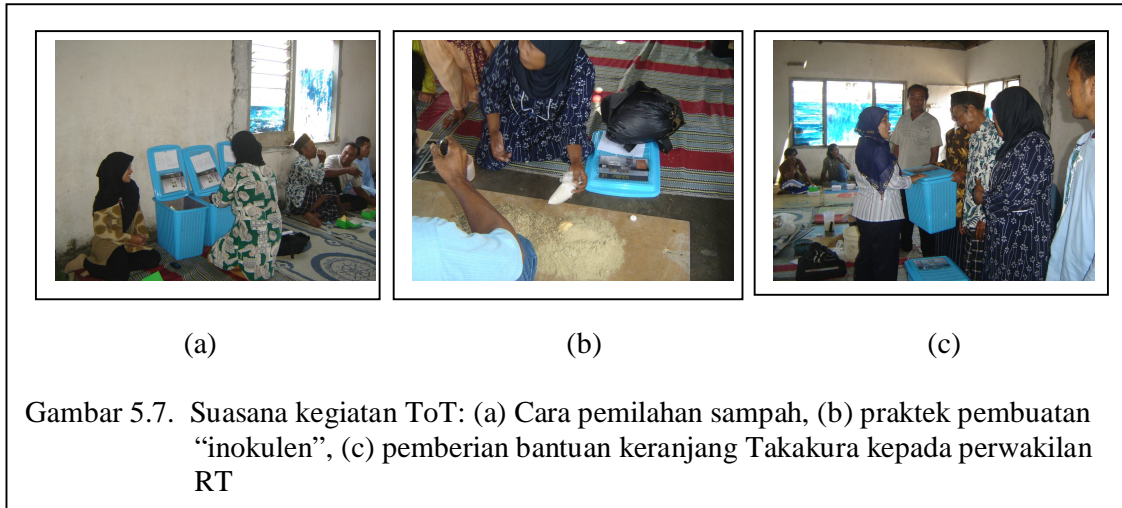
Pada sesi selanjutnya diisi dengan materi penyadaran/pemicuan warga supaya secara bertahap dapat meninggalkan kebiasaan buang air besar (BAB) di tempat terbuka/sungai, mengingat banyak kerugian yang diakibatkan dari kebiasaan ini, antara lain penyebaran penyakit dan menurunnya estetika (keindahan) dan kesopanan. Melalui kegiatan simulasi, masyarakat dipicu untuk mempunyai rasa jijik akibat terkontaminasinya makanan dan minuman oleh tinja yang telah dikonsumsi, sehingga masyarakat terpicu untuk meninggalkan kebiasaan BAB di sungai dan mau membuat dan menggunakan jamban. Selanjutnya masyarakat dipicu untuk berkeinginan membuat jamban secara sederhana secara saniter dengan tujuan mencegah berkembangbiaknya penyakit yang ditularkan oleh lalat.

Penyadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan khususnya mengenai pengelolaan air limbah dari aktivitas rumah tangga, ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan saluran air yang ada di sekitar rumah masing-masing. Jangan sampai saluran drainase yang fungsinya untuk mengalirkan air limbah dan air hujan berubah fungsi sebagai tempat penampungan sampah dan lumpur, sehingga mengakibatkan air limbah atau air hujan yang harusnya masuk saluran, tetapi tidak tertampung dan akhirnya tinggal menggenang. Hal ini akan menimbulkan tempat berkembang biaknya nyamuk dan bau yang kurang sedap.

Pelatihan tahap ketiga selanjutnya dilaksanakan dengan metode ToT (trainer of trainee), sebagai implementasi kegiatan pelatihan sebelumnya. Sebelum pelatihan tahap III ini, beberapa warga RW IV telah dikirim untuk mengikuti pelatihan pengelolaan sampah di LSM Bintari Semarang selama 2 hari. Perwakilan warga ini yang kemudian akan bertindak sebagai “trainer” bagi warga lainnya untuk mempraktekkan cara pengelolaan sampah dan dipandu oleh fasilitator. Pelatihan dilakukan dengan praktek pemilahan sampah, dengan cara mengelompokkan sampah berdasarkan cirri-ciri atau jenisnya, yaitu sampah organik, non organik dan sampah berbahaya beracun (B3). Melalui kegiatan pemilahan sampah ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sampah melalui aktivitas 3 R (reuse, recycle dan recovery). Masyarakat bisa menggunakan kembali barang (sampah) yang masih berkondisi “baik” , memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih berguna.

Kegiatan selanjutnya adalah praktek pemanfaatan sampah organik untuk dijadikan kompos dengan metode keranjang Takakura. Dalam pelatihan telah disediakan keranjang Takakura yang telah diisi “inokulen” (media tumbuhnya bakteri pengurai sampah), dan

siap diisi sampah jenis sampah organik. Masyarakat dilatih untuk membuat “inokulen” sendiri yang disampaikan/diperagakan oleh perwakilan warga yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya. Sebanyak 6 buah keranjang sudah dipersiapkan untuk diberikan ke perwakilan warga tiap-tiap RT sebagai media praktek pengelolaan sampah.



Gambar 5.7. Suasana kegiatan ToT: (a) Cara pemilahan sampah, (b) praktek pembuatan “inokulen”, (c) pemberian bantuan keranjang Takakura kepada perwakilan RT

### 5.7. Pengorganisasian Masyarakat

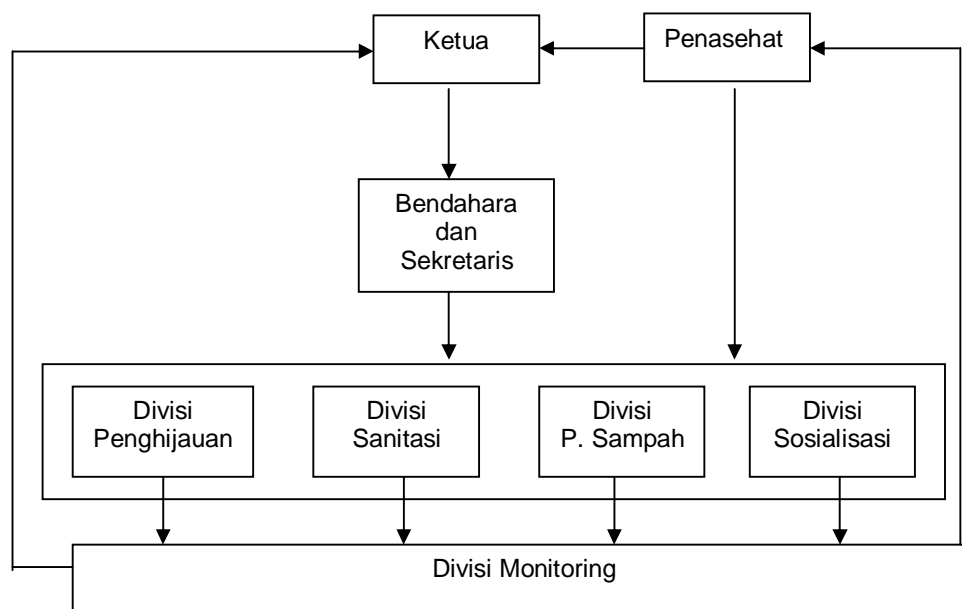
Kegiatan pengorganisasian masyarakat diawali dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran kritis masyarakat, melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah atau Focussed Group Discussion (FGD) dan pemetaan swadaya melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebagai upaya mendorong masyarakat membahas bersama persoalan riil di bidang sanitasi yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikannya, serta apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah sanitasi tersebut secara efektif dalam bentuk antara lain; komitmen (individu dan kelompok), keahlian, sumberdaya, kelembagaan, organisasi dan lain-lainnya. Proses pengorganisasian masyarakat ini akan mengarah pada terbentuknya kader masyarakat yang kemudian bersama fasilitator mendorong peran aktif masyarakat, dalam proses pengukuhan lembaga komunitas sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai motor penggerak masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah dan air limbah berbasis komunitas serta pembiasaan BAB di tempat tertutup di wilayahnya.

Kegiatan pengorganisasian masyarakat dilakukan pada sesi terakhir di Pelatihan Tahap II. Pada pertemuan tersebut akhirnya disepakati adanya pembentukan organisasi peduli lingkungan dengan nama “Lestari Guyub Rukun”. Dalam kesepakatan

pembentukan kelompok ini, organisasi kelompok terdiri dari penasehat, ketua, sekretaris dan bendahara serta dibagi dalam beberapa divisi (kelompok kerja) yaitu: divisi penghijauan, pengelolaan sampah, pengelolaan sanitasi, sosialisasi, monitoring.

Dalam struktur organisasi ini, penasehat sebagai tokoh masyarakat yang dituakan dapat memberikan pengarahan kepada ketua atau langsung pada setiap ketua divisi pembangunan. Sedang divisi monitoring dapat melakukan monitoring pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja pembangunan (divisi persampahan, sanitasi, penghijauan dan sosialisasi). Divisi ini dapat memberikan laporan pada dewan penasehat dan ketua melalui rapat umum. Struktur organisasi secara lengkap seperti ditunjukkan pada gambar 5.8.

Upaya penghidupan lembaga dan organisasi ini juga disertai dengan beberapa kegiatan yang intinya untuk menegakkan sistem sosial (sehingga mereka tidak eksploitatif terhadap masyarakat dan lembaga yang datang dari luar), meningkatkan sistem solidaritas yang dilandaskan pada saling percaya pada kelompok masyarakat, meningkatkan sistem keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi, serta meningkatkan kemandirian (tidak selalu berharap tentang bantuan dari luar untuk mengelola/penyediaan kebutuhan sarana dasar sanitasi lingkungan).



Gambar 5.8. : Struktur Organisasi Lestari Guyub Rukun

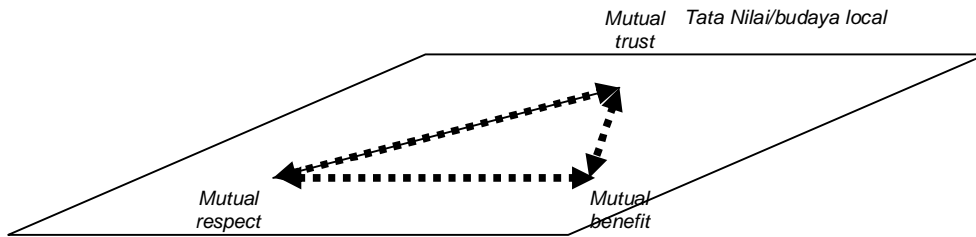
### 5.8. Model Pemberdayaan Masyarakat

Model pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam proses transformasi sosial guna meningkatkan peranserta dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan berdasarkan prakarsa aspirasi, kebutuhan dan kemampuan mereka. Model ini merupakan kebalikan model yang biasa direncanakan di luar masyarakat (program dari pusat/*top down planning*) yang dalam menyusun dan merencanakan kurang memperhatikan prakarsa, potensi kebutuhan dan inisiatif lokal, sehingga kepedulian masyarakat terhadap apa yang sudah dibangun sangat kecil dan inisiatif masyarakat sulit untuk berkembang akibatnya dalam berbagai hal masyarakat lokal sangat tergantung pada kekuatan dan kekuasaan luar dan pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan pendanaan.

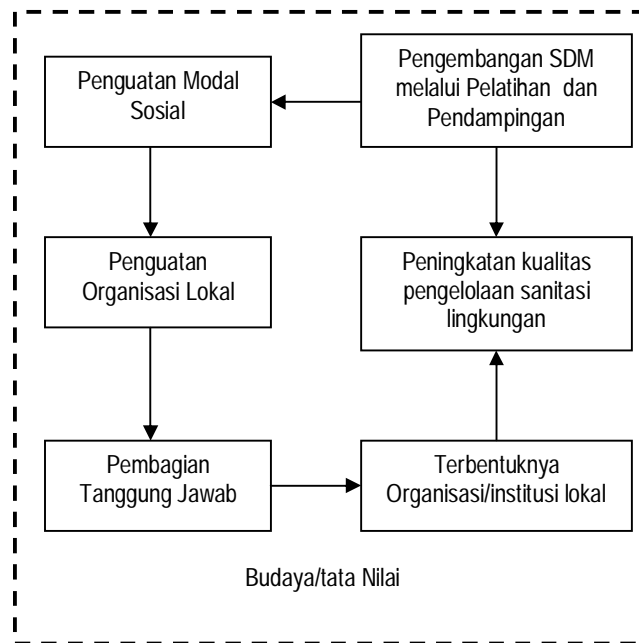
Model pemberdayaan masyarakat di RW IV Kelurahan Bandengan dilakukan melalui pembentukan organisasi Lestari Guyub Rukun. Organisasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan kelemahan pendekatan *top down planning* seperti yang telah dijelaskan pada sub bab modal sosial di atas. Model ini lebih menekankan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat lokal dengan menumbuhkan partisipasi, inisiatif dan kepemimpinan masyarakat lokal melalui modal sosial (organisasi dan kelembagaan) yang sudah ada, sehingga dalam penyusunan model ini memberdayakan masyarakat dan memperkuat institusi lokal sangat diperlukan.

Dalam model ini penguatan modal sosial dalam konteks tata nilai masyarakat setempat di tekankan pada pembukaan wawasan dan penguatan kepercayaan, kerjasama dan keuntungan yang akan didapatkan dengan adanya suatu organisasi/lembaga yang diciptakan dan dikelola dari dan untuk mereka sendiri dan tidak hanya terbatas pada konponen dasar modal sosial saja (kepercayaan, kerjasama dan jejaring). Dengan demikian sistem nilai/budaya lokal dalam partisipasi, inisiatif dan kepemimpinan masyarakat lokal ini akan menjadi dasar pijakan dan bingkai dalam penerapan model ini. Dengan demikian sikap dan ikut memiliki akan bisa ditumbuhkan dan pada akhirnya kepedulian masyarakat akan sanitasi lingkungan di tempat mereka akan meningkat.





Gambar 5.9. Tata Nilai dan Budaya Lokal Sebagai dasar Pijakan Pengembangan Modal Sosial dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan.



Gambar 5.10. Budaya/Tata Nilai Masyarakat Lokal sebagai Dasar dan Bingkai Pada Penguatan Modal Sosial

Melalui berbagai acara FGD, pelatihan dan pendampingan selama 2 tahun, dan melalui berbagai diskusi model ini dikembangkan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal (memberi kewenangan dan otoritas pada masyarakat lokal untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan dan secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil dalam pengelolaan

sanitasi lingkungan). Selain itu konsep pemberdayaan yang ditekankan pada model ini adalah upaya untuk memberikan keleluasan pada masyarakat agar mereka dapat menentukan pilihan-pilihan dalam merespon dinamika perubahan sesuai dengan yang telah mereka sepakati dan tetapkan dalam forum rembuk kampung.

Pada intinya model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan ini menekankan adanya:

- Proses mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan dari orang/lembaga luar kepada masyarakat lokal agar lebih berdaya dengan membangun kemandirian individu dan kelompok (memutus ketergantungan terhadap luar).
- Upaya memotivasi individu dan kelompok dalam masyarakat agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup mereka melalui proses rembuk dalam dalam organisasi yang mereka bentuk;
- Meningkatkan solidaritas antar warga dan kepedulian terhadap lingkungan hidup disekitar mereka;
- Meningkatkan keadilan kemudahan akses dalam pemenuhan kebutuhan akan sanitasi lingkungan;

Mengingat model ini dikembangkan dari penguatan modal sosial yang telah ada dalam koridor budaya dan tata nilai yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan aturan main dan tata krama harus merupakan pertimbangan utama dalam penyusunan model, sehingga dalam proses penerapan hal-hal juga perlu diperhatikan adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan cara:

- Pembagian kekuasaan secara adil berdasarkan musyawarah mufakat;
- Memunculkan kesadaran dan kekuatan kelompok sehingga dapat memperbesar pengaruh terhadap proses penerapan;
- Menciptakan iklim (suasana) yang kondusif, sesuai dengan budaya lokal agar masyarakat mampu berkembang dan memperkuat potensi dalam koridor tata nilai lokal;
- Ada perlindungan sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara terbuka dan tanpa ada tekanan serta memiliki akses dan tanggungjawan yang sama terhadap proses perencanaan, implementasi dan pemanfaatan serta pemeliharannya.

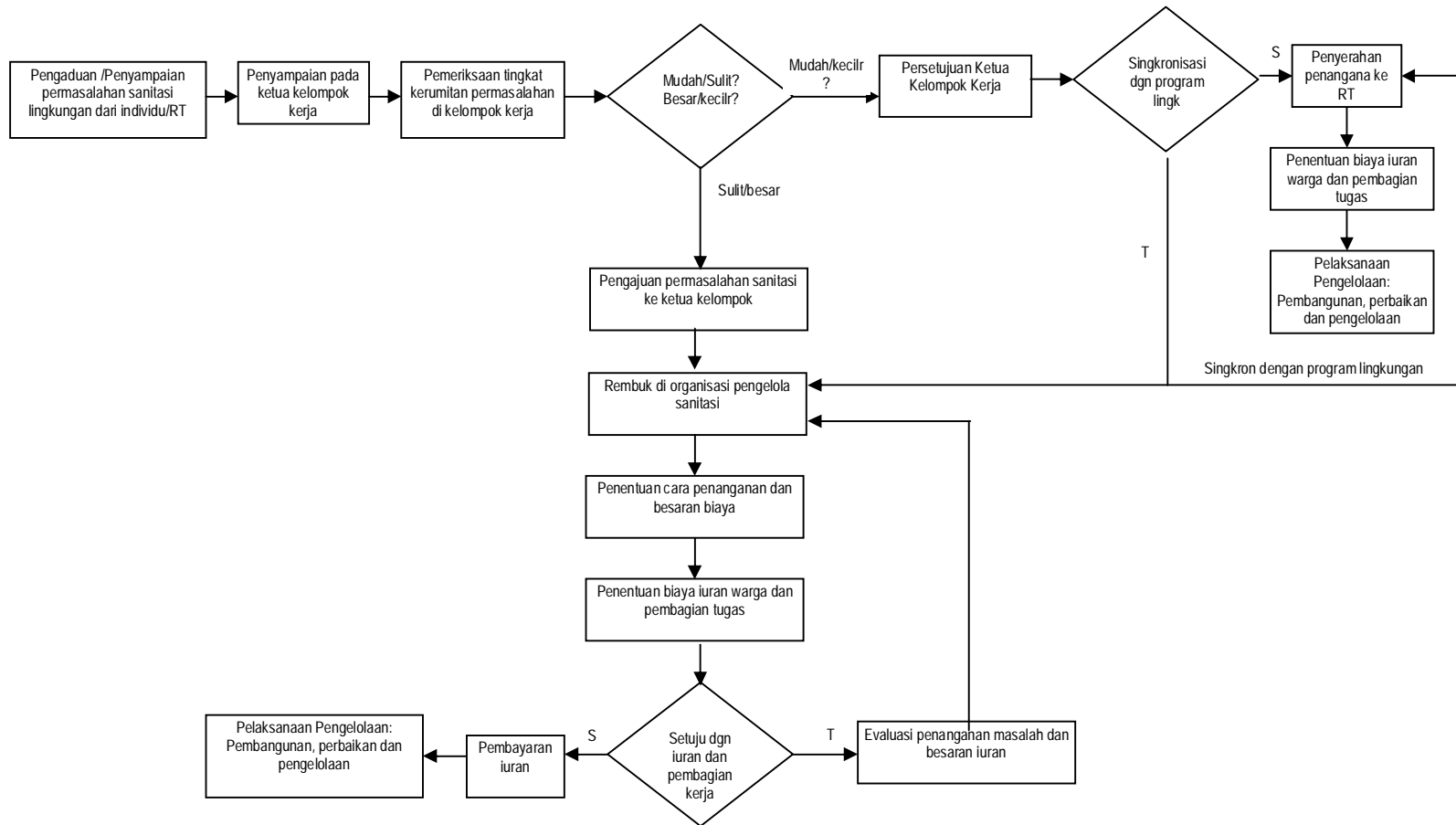
Peningkatan kapasitas SDM, penguatan modal sosial dan perubahan ke arah pemberdayaan di pemukiman Bandengan dilakukan dengan berbagai cara, dan dalam model ini antara lain dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan : Memberikan pelatihan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya bahwa kegiatan pelatihan dan sosialisasi dilakukan sebanyak 3 kali, mulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat, kesadaran dan praktek.
- b. Pengorganisasian masyarakat, dengan terbentuknya organisasi "Lestari Guyub Rukun" . Dalam rangka mewujudkan kebersamaan dan keterlibatan dalam kelompok, beberapa pengurus diberikan kesempatan mengikuti pelatihan pembuatan kompos yang diselenggarakan oleh salah satu LSM lingkungan (Bintari), dengan harapan, setelah mengikuti pelatihan, peserta akan dapat memberikan pelatihan ke anggota masyarakat yang lain melalui kegiatan ToT (Trainer of Trainee).

Mekanisme pelaksanaan model ini dalam lingkup masyarakat dapat dijalankan secara cluster masalah, sehingga masalah tidak akan menumpuk di kelompok besar. Pada model ini jika masalah sanitasi muncul, masyarakat ada dalam lingkup kerja kelompok kerja dan dalam lingkup RT akan membahas pada kelompok kerja dulu dan diselesaikan dalam satuan RT atau kelompok rumah tangga sesuai arahan ketua kelompok kerja, dan besarnya iuran akan ditentukan secara cluster dalam satuan RT atau kelompok rumah. Jika kelompok kerja sudah bisa menangani dan permasalahan terkait dengan permasalahan sanitasi, maka kelompok kerja tinggal meminta persetujuan pada ketua kelompok, tidak usah melalui rapat/diskusi umum dalam organisasi dan besaran biaya akan di rebug dalam cluster area yang lebih kecil.

Kelompok kerja yang sudah di bentuk dapat membahas permasalahan mulai dari akar masalah, cara penyelesaian dan penganggarnya serta siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan. Pembahasan besaran penganggaran ini termasuk juga penentuan sumber dana dan besaran retribusi/iuran. Jika tahapan ini sudah disetujui dalam kelompok kerja maka perwakilan dari kelompok kerja akan membawa atau meminta persetujuan ketua organisasi. Pendiskusian dalam organisasi ini terkait dengan persetujuan pelaksanaan dan penanganan untuk mensinkronkan program pembangunan/pengelolaan sanitasi ditingkat lokal dengan program yang lebih luas (dalam satuan RW). Jika tidak ada masalah kelompok kerja akan melaksanakan kegiatan dengan mengembalikan dikelompok RT dengan arahan dari ketua kelompok kerja.

Jika permasalahan besar dalam arti mengkait antar RT dan atau antar sektor atau masalah untuk wilayah RW, maka permasalahan akan dibawa oleh ketua kelompok kerja ke diskusi di organisasi dan akan di bahas pada rapat umum. Di sini kelompok besar akan membahas permasalahan, cara pemecahan dan tahapan pelaksanaan dan cara pembiayaanya, yang kemudian dikembalikan ke kelompok kerja bidang sanitasi dan publikasi untuk disebarkan ke anggota masyarakat. Hasil rapat akan disampaikan oleh divisi publikasi ke seluruh/sebagain RT yang terkait. Jika ada permasalahan ketidaksutujuan maka masyarakat bisa melakukan/menyampaikan ke RT dan RT ke Ketua kelompok kerja dan ini akan di bahas lagi di rapat umum dan jika tidak ada komplain maka kelompok kerja akan memberikan laporan pada ketua untuk pelaksanaan pengelolaan sanitasi.



Gambar 5.11. Prosedur Teknis Pengelolaan Sistem Lingkungan

### **5.9. Pengenalan Usaha-Usaha Sanitasi**

Upaya pengenalan usaha sanitasi secara teoritis dan praktis telah dikenalkan dalam serangkaian kegiatan pelatihan di RW IV Bandengan seperti telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Pada dasarnya dalam upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, perlu dilakukan usaha nyata dalam pelaksanaannya melalui pemilihan teknologi tepat guna. Kriteria pemilihan teknologi untuk sanitasi yang akan dipilih sedapat mungkin dapat diterapkan oleh masyarakat setempat namun memenuhi persyaratan teknis, kesehatan dan dampaknya terhadap lingkungan serta layak bila ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pengembangan teknologi pelaksanaannya.

Adapun spesifikasi teknologi yang dipilih harus memenuhi kriteria :

1. Dampak terhadap lingkungan, dimana tanah dan air tidak terkontaminasi, tidak menimbulkan lalat, nyamuk serta tikus berkumpul dan berkembang biak.
2. Pelaksanaan pembangunan; cepat dan mudah pengerjaan serta perbaikannya, mampu mengadaptasi bahan dan tenaga setempat.
3. Mudah dan nyaman dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta aman dan tahan lama.
4. Pembiayaannya dapat dijangkau oleh masyarakat baik pembuatan maupun pemeliharaannya.
5. Diusahakan mengacu pada bentuk sarana yang standar sehingga memudahkan dalam pembuatan dan perawatan.

#### **5.9.1. Pengelolaan Sampah**

Dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, sesuai dengan materi pelatihan yang sudah dilakukan, maka pengelolaan sampah di daerah Bandengan dimulai dengan pengenalan upaya pemilahan sampah. Konsep pemilahan sampah ini dapat dilakukan mulai dari sumber sampah yaitu masing-masing rumah penduduk. Di tiap rumah disediakan kantong atau tempat memilah sampah yang dibagi atas 3 kategori yaitu: sampah organik, sampah non organik dan sampah berbahaya (B3). Sampah organik berupa sisa makanan, sampah dapur, daun, dll, dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Pengenalan teknik pembuatan kompos metode Takakura yang sederhana dapat diaplikasikan dalam keseharian masyarakat. Dalam pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 3 kali, dan 1 kali pelatihan di LSM Bintari, telah disediakan 9 buah keranjang Takakura yang dibagikan untuk tiap-tiap RT sebagai media pembelajaran masyarakat .

### 5.9.2. Pengelolaan Air Limbah

Penanganan pembuangan air limbah rumah tangga dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) cara yaitu :

- Cara setempat, yaitu jika satu atau beberapa rumah tangga membuang air limbah/kotoran manusia pada suatu bangunan pengolahan yang terletak dekat dengan rumah mereka, umumnya berupa cubluk atau tangki septic dan untuk air limbah lain (dapur,cuci, mandi) dibuang kesaluran pembuang air limbah (SPAL).
- Cara terpusat , yaitu pembuangan seluruh air limbah rumah tangga (air limbah jamban dan air bekas) dari rumah tangga suatu lingkungan permukiman (RW, desa) yang dialirkan melalui system saluran menuju tempat pengolahan air limbah (IPAL).

Usaha sanitasi dalam pengelolaan air limbah dilakukan melalui pembuatan contoh saluran drainase di RT 5, setelah melalui rembuk warga. Metode pelaksanaan pekerjaan dengan metode swakelola dan metode dipihak ketigakan. Metode pengerjaan swakelola berarti pekerjaan tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya artinya dalam hal pekerjaan, aturan main yang diterapkan sama dengan aturan main yang diterapkan pada metode pengerjaan dipihak ketigakan. Jadi apabila hasil kerja tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan maka masyarakat harus menanggung resiko beban perbaikannya.

- Jenis pekerjaan dan metode pelaksanaannya :

Jenis Pekerjaan	Metode Pelaksanaan	Keterangan
Pembuatan drainase	Swakelola	Dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa dan tenaga ahli

- Detailed Engineering Design (Rincian Desain Teknis)
  - (a) Survey dan pengukuran, dilakukan setelah dilakukan rembuk warga dan muncul beberapa alternatif lokasi berdasarkan informasi dari masing-masing RT khususnya mengenai kondisi drainase di lingkungan masing-masing. Tindakan selanjutnya adalah survey dan pengukuran di calon lokasi.
  - (b) Gambar teknik rinci, dilakukan setelah survey lokasi dan pengukuran.
  - (c) Spesifikasi teknis dari material dan peralatan yang dibutuhkan.

Pembangunan saluran drainase ini menyambung pada saluran yang telah ada dengan lokasi di RT 5. Adapun panjang dari saluran ini adalah 60 m untuk lokasi salurannya dapat dilihat pada peta terlampir. Visualisasi kegiatan pekerjaan pembuatan saluran drainase seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.12. Pekerjaan Pembuatan Drainase : a) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, b). Saluran drainase yang sudah jadi.

### 5.9.3. Pengelolaan Tinja

Usaha sanitasi dalam pengelolaan air limbah dilakukan melalui pembuatan contoh jamban komunal dengan memperhatikan kriteria teknologi dan kondisi setempat. Rancangan rinci berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pembuangan Limbah Tinja

Kriteria	Ketentuan
Lingkungan	Tidak mengkontaminasi lapisan tanah permukaan, air permukaan maupun air tanah yang mungkin masuk ke dalam sumber air atau sumur.
Vektor	Tampungannya tidak mudah dimasuki lalat maupun nyamuk. Penanganan Tidak ada penanganan pada tinja segar
Kenyamanan	Bebas dari bau dan tidak terlihat oleh mata
Pengoperasian dan Pemeliharaan	Harus sederhana dan mudah Biaya untuk operasi dan pemeliharaan terjangkau oleh masyarakat.



<b>Kriteria</b>	<b>Ketentuan</b>
Bahan dan tenaga	Menggunakan bahan lokal dan dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat.
Penggunaan air	Penggunaan air untuk pembersihan / penggelontoran sedikit mungkin.
Perluasan	Jika kepadatan penduduk meningkat, peningkatan kapasitas dan fasilitas pembuangan air limbah dimungkinkan.
Kebiasaan setempat	Metode pengumpul penampungan, pengangkutan dan pengolahan limbah harus disesuaikan dengan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat.
Pemanfaatan limbah	Sistem dirancang sedemikian sehingga memungkinkan untuk pemanfaatan limbah.

## 2. Detailed Engineering Design (Rincian Desain Teknis)

- (a) Survey dan pengukuran dilakukan setelah dilakukan rembuk warga dan muncul beberapa alternatif lokasi berdasarkan informasi dari masing-masing RT khususnya mengenai ketersediaan lahan untuk dibangun jamban dengan tangki septik. Tindakan selanjutnya adalah survey dan pengukuran di calon lokasi.
- (d) Gambar teknik rinci, dilakukan setelah survey lokasi dan pengukuran/pengambilan sampel tanah dan analisis laboratorium untuk mengetahui sifat tanah (jenis dan permeabilitas tanah).
- (c) Spesifikasi teknis dari material dan peralatan yang dibutuhkan.

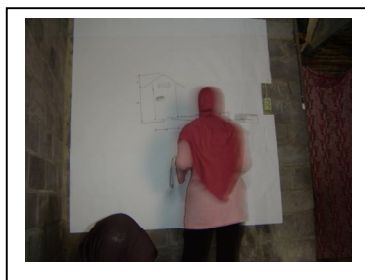
Metode pelaksanaan pekerjaan dengan metode swakelola dan metode dipihak ketigakan. Metode pengerjaan swakelola berarti pekerjaan tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri, tetapi masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya artinya dalam hal pekerjaan, aturan main yang diterapkan sama dengan aturan main yang diterapkan pada metode pengerjaan dipihak ketigakan. Jadi apabila hasil kerja tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan maka masyarakat harus menanggung resiko beban perbaikannya.

Jenis pekerjaan dan metode pelaksanaannya :

Jenis Pekerjaan	Metode Pelaksanaan	Keterangan
Pembuatan WC dan penampung limbah	Swakelola	Dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa dan tenaga ahli

### 3. Rincian Biaya

Rencana anggaran biaya (RAB) yang terkait dengan kebutuhan dalam mengelola kegiatan sanitasi di RT.03 RW IV Desa Bandengan Kecamatan Kendal Kota disusun bersumber pada data dari DED. Selain itu, penyusunan rincian biaya tersebut harus didasarkan pada harga dasar atau harga setempat.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Gambar 5.13. Gambar pekerjaan pembangunan jamban : (a) dan (b) rembuk warga perencanaan lokasi dan pemilihan teknologi, (c) pekerjaan penggalian tangki septic, (d) tangki septic yang sudah jadi, (e) bangunan WC dengan 2 pintu

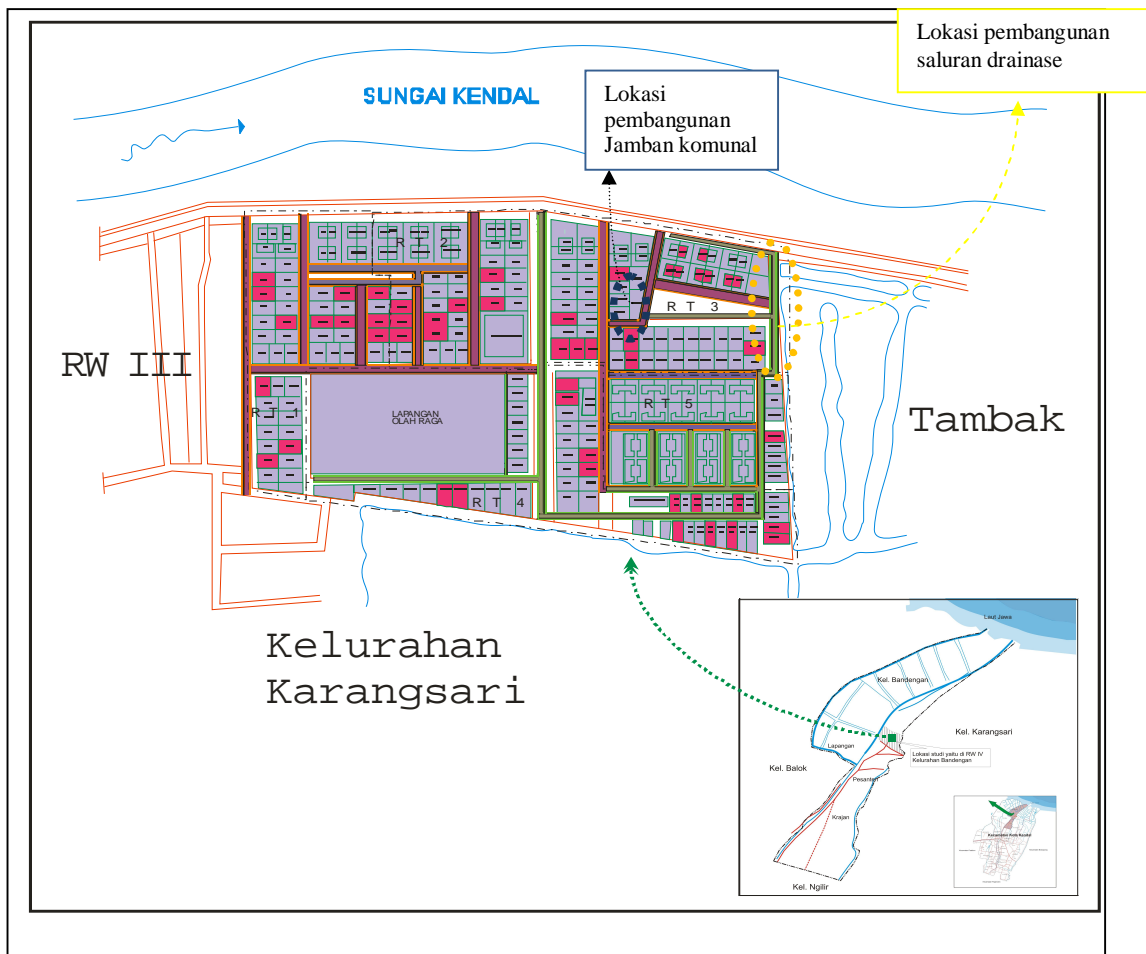
#### 5.9.4. Badan Pengelola Sarana Sanitasi

Dalam menjamin keberlanjutan kegiatan ini, terutama pasca terbangunnya saluran drainase ini, maka dibentuklah badan pengelola berdasarkan kesepakatan bersama. Badan pengelola ini secara organisatoris kedudukannya berada di bawah koordinasi

kelompok masyarakat “Lestari Guyub Rukun”. Tujuan dibentuknya badan pengelola ini antara lain :

- a. menjamin keberlanjutan pelayanan sanitasi di lingkungan masyarakat
- b. masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan sarana sanitasi secara tepat dan berguna
- c. menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang telah dibangun
- d. sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab masyarakat

Untuk mewujudkan terbentuknya badan pengelola, maka diadakan pelatihan yang sekaligus membentuk badan pengelola sarana drainase dan jamban. Setelah melalui musyawarah, maka terbentuklah badan pengelola sarana sanitasi di RT 3 untuk mengelola jamban dan di RT 5 untuk mengelola drainase. Susunan kepengurusannya terdiri atas Ketu, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara.



Gambar 5.14. Lokasi Pembangunan Saluran Drainase dan Jamban Umum

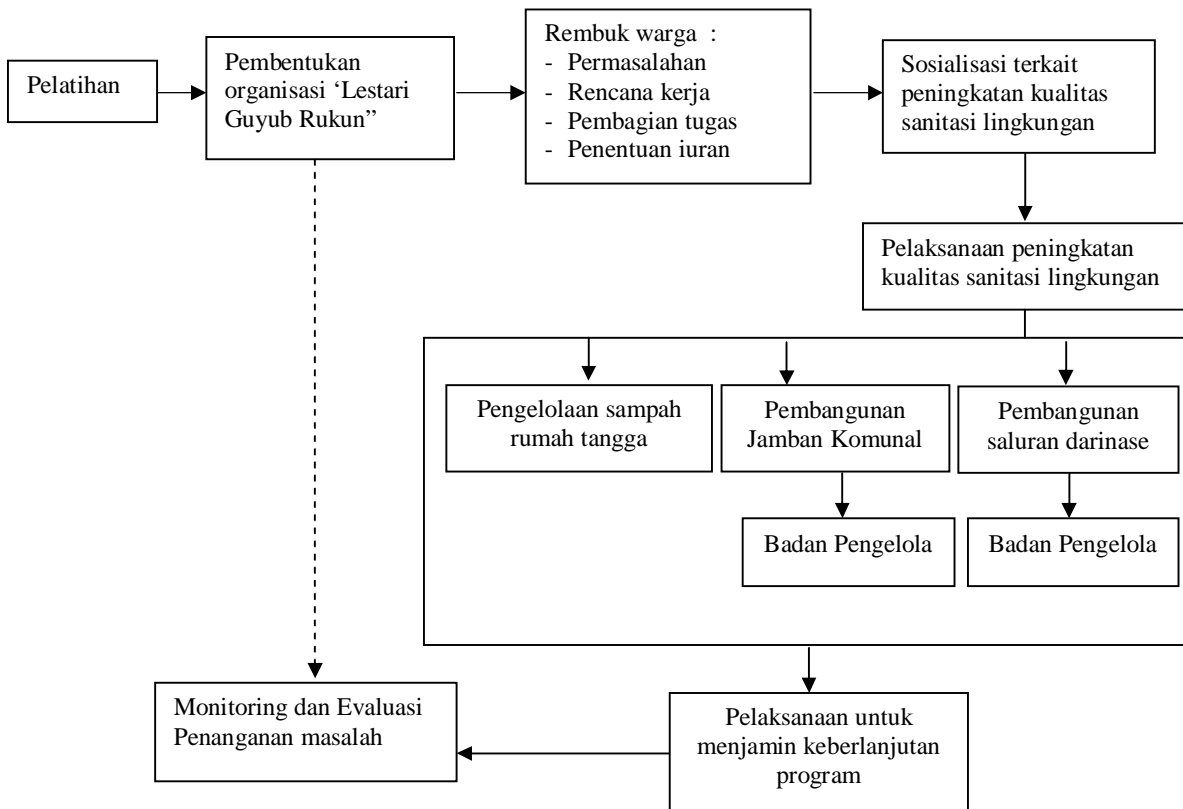
### 5.10. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kesemua kegiatan telah dapat dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dasar pelaksanaan ini disesuaikan dengan prosedur teknis pengelolaan sanitasi lingkungan yang telah dilaksanakan di RW IV. Alur pemikiran pelaksanaan dapat di jelaskan melalui bagan yang ada di gambar 5.15. Pada tahap ini evaluasi yang pertama kali dilakukan adalah evaluasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga melalui pembuatan kompos. Pada awal evaluasi dari 6 buah komposter yang diberikan hanya ada 1 yang cukup berhasil sedangkan lima komposter yang lainnya mengalami berbagai kendala diantaranya, tidak ada waktu untuk mengisi komposter, kemudian adanya pemahaman yang keliru terkait dengan jenis sampah yang harus dimasukkan, selain itu kendala teknis yaitu bantalan tidak berfungsi dengan normal sehingga air lindi mengalir keluar. Dari beberapa kendala yang ada maka sebagian besar yang menjadi kendala adanya kekeliruan adalah pada cara penggunaan komposter tersebut. Dampak dari ketidaktahuan masyarakat ini mengakibatkan belum berjalannya proses pengomposan. Kegiatan Pada saat dilakukan evaluasi dilakukan oleh divisi sampah kelompok “Lestari Guyub Rukun”. Namun kurang nya monitoring oleh petugas dari divisi sampah, banyak diantara komposter yang sudah dibagikan “inokulen” kering karena kurang disiram ataupun diaduk, sehingga pada saat itu diputuskan divisi pengelolaan sampah untuk lebih sering mengecek komposter.

Sebelum melakukan evaluasi terhadap penggunaan jamban komunal maka akan disampaikan terlebih dahulu proses pembangunan jamban komunal tersebut serta proses alih tanggung jawab dari pemberi program kepada masyarakat. Sebelum dilakukan penggunaan jamban komunal tersebut maka sebelumnya dibuat kesepakatan dengan membentuk badan pengelola. Badan pengelola ini mempunyai tanggung jawab untuk merawat, menarik dan mengelola iuran, menentukan besarnya iuran serta membuat program kerja. Hal ini dimaksudkan agar ada tanggung jawab bagi penggunaan jamban komunal tersebut. Jamban komunal tersebut terletak di RT 5, yang bersebelahan dengan mushola, sehingga tidak ada kesulitan dalam pembesian tanah serta penggunaan air. Jamban komunal ini dibangun dengan luasan masing-masing 1 m<sup>2</sup> dan terdapat 2 buah unit. Berdasarkan evaluasi setelah dibangunnya jamban, masyarakat merasa senang dengan dibangunnya jamban untuk umum tersebut. Masyarakat merasa lebih nyaman melakukan aktivitas buang air besar (BAB) di tempat tertutup dibanding di tempat terbuka (sungai). Oleh karena jarak antara selesainya pembangunan dan evaluasi pemakaian, serta baru terbentuknya badan pengelola, maka belum dapat diketahui lebih jauh mengenai

program pengelolaan secara lebih rinci, seperti misalnya keterlibatan pengguna dalam menjaga kebersihan, pendanaan, dan lain-lain.

Untuk saluran drainase seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pembangunan saluran drainase ini menyambung pada saluran yang telah ada dengan lokasi di RT 3. Adapun panjang dari saluran ini adalah 60 m untuk lokasi salurannya dapat dilihat pada peta dibawah. Untuk penggunaan saluran drainase ini sudah berjalan dengan baik karena didalam pembangunan dan spesifikasinya telah sesuai seperti yang disyaratkan. Namun yang mungkin menjadi kendala seperti saluran drainase yang lainnya adalah upaya perawatan secara rutin oleh warga supaya sampah tidak menumpuk dan menutup saluran.



Gambar 5.15. Diagram Alir Teknis Upaya Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan di RW IV Kelurahan Bandengan

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, maka didapatkan temuan di lapangan beberapa hal yang menjadi catatan dalam penerapan model pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan di RW IV Bandengan ini adalah: masyarakat masih kurang merasa bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah milik warga sehingga hasilnya yang didapatkan belum maksimal, kemudian terkait dengan pendanaan (iuran) maka warga sepakat dengan adanya iuran tersebut, namun keswadayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih perlu ditumbuhkan. Keberadaan organisasi masyarakat “Lestari Guyub Rukun” perlu lebih banyak melakukan “action”/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, seperti kegiatan kebersihan bersama secara rutin, penggalan dana pengelolaan, dll.